



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA: KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

Nama : WARTO
 Jabatan : DEKAN
 NHK : 142227

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.558.100.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/300 m2 di SUKOHARJO,
 HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- Tanah Seluas 148 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
- 3. Tanah Seluas 1362 m² di KARANGANYAR, WARISAN Rp. 185.000.000
- 4. Tanah Seluas 1065 m2 di KARANGANYAR, WARISAN Rp. 160.000.000
- 5. Tanah Seluas 202 m2 di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp.
- Tanah Seluas 400 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp.
 200.000.000
- 7. Tanah Seluas 150 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
- 8. Tanah Seluas 1614 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
- Tanah Seluas 1629 m² di KARANGANYAR, WARISAN Rp. 250,000,000
- 10. Tanah dan Bangunan Seluas 19.19 m2/19.19 m2 di KOTA SURAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 298.100.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 437.000.000

 MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000





2.	MOTOR,	HONDA	SCOOPY	Tahun	2018,	HASIL	SENDIRI	Rp.
	10.000.00	00						

- MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
- MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
- MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	37.000.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	742.153 <mark>.67</mark> 0
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	
al.	Sub Total	Rp.	3.774.253.670
III. HUT	TANG	Rp.	Kerry Kerry
IV.TO	TAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.774.253.670

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.